

Jokowi:

Pemerintah Tak Akan Toleransi Radikalisme,

Apa Pun Organisasinya

Kontributor Kompas TV, Fitri Rachmawati

Kompas.com - 23/11/2017, 17:21 WIB



Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan), Ketua PBNU KH Said Agil Siroj (ketiga kiri) dan Ketua MUI KH Maruf Amin (tengah) memukul Gendang Beleg secara bersama-sama saat membuka Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram, Kamis (23/11). Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang berlangsung hingga 26 November 2017 itu dihadiri oleh 1.000 ulama se-Indonesia yang bertema Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga.

ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/aww/17.(ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)

MATARAM, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah memilih tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran [radikal](#) dan [intoleransi](#) yang ada di Indonesia.

Apalagi, lanjut dia, telah ada undang-undang dan perppu yang telah menjadi payung hukum untuk menyikapi aliran-aliran radikal maupun intoleransi tersebut.

"Saya sudah minta kepada seluruh jajaran di pemerintahan agar tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran-aliran radikal dan yang intoleran yang ada di negara kita, apa pun organisasinya," kata [Jokowi](#) dalam pidatonya saat menghadiri dan membuka Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU di Mataram, NTB, Kamis (23/11/2017).

(Baca juga: [UU Usang dan Ujaran Kebencian Akan Dibahas dalam Munas NU di Lombok](#))

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dikenal baik dalam hal toleransi.. sehingga para tokoh agama dari negara, seperti Afganistan dan Pakistan, berencana datang ke Indonesia untuk belajar langsung cara Indonesia menjaga kedamaian meskipun memiliki pulau, bahasa, dan keberagaman yang sangat luas.

"Ulama-ulama besar Pakistan, Afganistan, termasuk kelompok Taliban, akan bertemu dengan ulama-ulama Indonesia. Tahapan berikutnya, ulama-ulama kita yang kita pilih bisa datang ke negara-negara itu untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang ada di Indonesia," kata Jokowi.



Presiden RI Joko Widodo membuka Munas dan Konferensi Besar Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Islamic Center Mataram, Kamis (23/11/2017).(KOMPAS.com/Fitri Rachmawati)

Menurut dia, negara-negara tersebut menilai Indonesia sebagai negara yang tidak punya kepentingan, netral dan sejuk, apalagi dengan adanya organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama.

(Baca juga : [Presiden Jokowi Buka Munas NU di Mataram](#))

Jokowi berharap, hasil pembahasan dan rekomendasi para ulama yang mengikuti Munas dan konferensi NU di Mataram bisa disampaikan kepada pemerintah agar pihaknya bisa menindaklanjutinya, terutama yang berkaitan dengan radikalisme dan gerakan intoleran.

Jokowi mengaku akan meminta pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi aliran-aliran yang mengganggu perdamaian di negeri ini.



Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat pembukaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram, Kamis (23/11). Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang berlangsung hingga 26 November 2017 itu dihadiri oleh 1.000 ulama se-Indonesia yang bertema *Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga*. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/aww/17.(ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)

Topik yang disampaikan Jokowi sejalan dengan tema besar Munas dan Konferensi Besar Alim Ulama NU di Mataram, "*Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga*".

Jokowi membuka secara simbolis acara ini dengan memukul gedang belek, alat musik tradisional Lombok, bersama sejumlah pengurus NU dan Gubernur NTB, Zainul Majdi.